SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ASPEK BUDAYA MUTU PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Email : ekapriambodo.ucy@gmail.com

ABSTRAK

Universities produce many scientific works that can be valuable and must be protected, which so far have not been protected, with several cases, including plagiarism, not producing economic value, not being appreciated, and lack of accreditation assessment. For this reason, it is important to provide legal protection for the resulting Intellectual Property Rights so that they can be valuable and can guarantee the rights of researchers. However, not all universities provide facilities and facilitators for lecturers and students who produce scientific works, namely by not providing education, forums, and policies that assist in the registration of intellectual property rights. In addition, Intellectual Property Rights is one of the points in the assessment of credit scores for Lecturers. The problem in this study is how the role of the Intellectual Property Rights Center in universities and whether Intellectual Property Rights can be a point of quality culture at universities in Indonesia. Based on this description, the researcher intends to conduct a study entitled Center for Intellectual Property Rights Aspects of Quality Culture of Higher Education in Indonesia. The purpose of this study was to determine the need to establish a center for Intellectual Property Rights as a Higher Education Quality Culture. This study uses a normative juridical approach, namely by taking an inventory, reviewing, and analyzing and understanding the law as a set of regulations and positive norms in the applicable legal system. Protection of copyrighted works within universities is very important in order to improve the quality of research and community service, the HKI Center is one of the institutions that can encourage IPR behavior and become a Quality Culture in Higher Education and increase the assessment of college accreditation.

ARTICLE INFO

Article History:*Received 10 Jun 2022**Revised 05 Jul 2022**Accepted 12 Jul 2022**Available online 14 Juli 2022*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Universities, Education, norm Tax Avoidance.*

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah dikenal sejak lama, terutama sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan mengesahkan *Agreement The World Trade Organization*, yaitu Undang – Undang RI No.: 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, pada tanggal 02 November 1994, dan sejak saat itu pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual terus dilakukan perubahan – perubahan.

Perkembangan dan perubahan perdagangan dan perekonomian, secara tidak langsung mendorong produsen dan pencipta untuk mendaftarkan Kekayaan intelektualnya demi menjaga kuantitas dan kualitas maupun adanya nilai ekonomi. Tingkat kesadaran akan pentingnya peranan Hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah permohonan akan hak cipta dan paten. Tantangan Perguruan Tinggi untuk membentuk Sentra Hak

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, email : ekapriambodo.ucy@gmail.com.

Kekayaan Intelektual dikarenakan dibutuhkan adanya peran aktif dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa.

Pemerintah memiliki peranan besar dalam mewujudkan hak kekayaan intelektual di Indonesia menjadi budaya yang nantinya di harapkan di dalam perguruan tinggi akan menjadi budaya mutu. Hal tersebut menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan hak kekayaan intelektual menjadi salah satu pendorong budaya mutu, karena selain dibutuhkan peran dari perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen, akan tetapi upaya pemerintah mendorong Perguruan Tinggi untuk membentuk Sentra HKI tidak sepenuhnya dipenuhi oleh perguruan tinggi, karena terdapat berbagai sisi yang harus di persiapkan dan di butuhkan untuk pembuatan Sentra HKI.

Salah satu dorongan Pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK, yang di dalamnya diatur secara jelas HKI dalam Pasal 13 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK, berbunyi : “Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.” Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Hak Kekayaan Intelektual masuk di dalam lingkungan Perguruan Tinggi. Dorongan perkembangan teknologi menjadikan perguruan tinggi ikut berperan aktif meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang memiliki basis Hak Kekayaan Intelektual.

Perguruan Tinggi banyak menghasilkan karya – karya ilmiah yang dapat bernilai dan harus dilindungi, yang selama ini belum terlindungi, dengan beberapa kasus, antara lain plagiasi, tidak menghasilkan nilai ekonomi, tidak dihargai, dan kurangnya penilaian akreditasi. Untuk itu pentingnya diberikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan agar dapat bernilai dan dapat menjamin hak dari peneliti. Namun demikian tidak semua perguruan tinggi memberikan fasilitas dan fasilitator terhadap Dosen dan Mahasiswa yang menghasilkan karya – karya ilmiah, yaitu dengan tidak memberikan edukasi, wadah, dan kebijakan yang membantu dalam hal pendaftaran HKI. Selain itu HKI menjadi salah satu poin dalam penilaian angka kredit untuk Dosen.

Atas dasar itulah peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **Sentra Hak Kekayaan Intelektual Aspek Budaya Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia**.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Sentra hak kekayaan intelektual pada perguruan Tinggi dan Apakah Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi poin dari budaya mutu Pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perlindungan terhadap hak – hak yang tidak berwujud, lebih muda usianya dibanding dengan perlindungan suatu hak yang berwujud, seperti hak atas tanah dan rumah, menurut sejarahnya hak yang tidak berwujud seperti hak atas kekayaan intelektual belum lama diakui dan dilindungi keberadaannya.²

HaKI adalah karya intelektual yang dihasilkan manusia di mana memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya serta memiliki nilai ekonomi karena manfaat

²Hari Sasangka, *Kompilasi Undang – Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm 1.

yang dapat dinikmati.³ Sedangkan Rachmadi Usman mengartikan HaKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya – karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Pada tahun 2000, istilah HaKI sudah tidak dipakai, dan digantikan dengan istilah HKI atau Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI no.M.03.PR.07.10 tahun 2000.

Hak Kekayaan Intelektual sering disebut dan disingkat dengan istilah HKI. HKI pada awalnya bernama Hak Atas Kekayaan Intelektual atau dikenal *Intellectual Property Right*. HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru, yang dalam proses penciptaan karya tersebut diperlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya.

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual dikenal dalam hukum Anglo Saxon. Konsep Hak kekayaan Intelektual meliputi:⁵

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif;
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara), misal : hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, atau hak menghasilkan produk tertentu.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) adalah

aset berharga yang bersifat nonkebendaan (immaterial) yang berasal dari hasil kreativitas dan inovasi manusia. Kreativitas adalah daya cipta manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta. Sedangkan inovasi adalah hasil penemuan manusia di bidang teknologi dan desain yang dilindungi Hak Kekayaan Industri (Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman).⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta dan inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya – karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.⁷ Ruang lingkup HaKI sangat luas, di dalamnya mencakup tentang semua kekayaan intelektual seperti sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.⁸ HAKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak – hak yuridis dari karya – karya atau ciptaan – ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan – kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.⁹

Pemegang HKI diberikan hak monopoli untuk mengeksploitasi dari produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku. Namun terhadap hal tersebut ada pengecualian yaitu dalam Pasal 14 PP Nomor 20 tahun 2005 yang menyebutkan

³ Afrillyanna Purba, *TRIPs – WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005) hlm 9.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003), hlm 2.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001) hlm 1-2.

⁶ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2018), hlm 19.

⁷ *Ibid.*, hlm 21.

⁸ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 21.

⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003) hlm 8.

bahwa alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara komersial dan non komersial.

1.2. HAK CIPTA

Hak Cipta terdiri atas Hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku hak terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan. Karena adanya hak moral tersebut, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.¹⁰

Prinsip dalam pemberian perlindungan Hak Cipta yang ianut dalam undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua penciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya.¹¹

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan definisi Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hak eksklusif dalam Pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak yang hanya di peruntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki Sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak moral pencipta terdiri dari beberapa hak, antara lain :

1. Hak Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya
2. Hak suatu Ciptaan tidak boleh diubah
3. Hak tidak dirubahnya judul dan anak judul ciptaan
4. Hak untuk dicantumkan dan perubahan nama samaran pencipta.

Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk – bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.¹²

Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Benda tidak berwujud merupakan benda termasuk dalam hak immaterial. Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan : “menurut paham undang – undang yang dinamakan benda ialah tiap – tiap barang dan tiap – tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (property) atau hak milik.”

Beberapa istilah dalam Hak Cipta dapat dilihat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Definisi Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode

¹⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual ...Op.Cit.*, hlm 121.

¹¹ Hari Sasangka, *Ibid.*, hlm 15.

¹² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Ibid.*, hlm 121.

atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

1.2.1. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara Bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Subjek dalam hak cipta adalah orang – orang yang berhubungan dengan ciptaan itu sendiri. Subjek selain pencipta yang merupakan orang atau badan hukum tersebut mendapatkan hak karena adanya pengalihan hak cipta dari pencipta dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian yang dilakukan dengan pencipta.¹³

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak, yaitu kewenangan untuk mempunyai hak – hak dan setiap hak tertentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut sebagai subjek hukum yang terdiri atas manusia dan badan hukum.¹⁴ Ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang dapat diberikan perlindungan hak cipta, yaitu :

- A. Perorangan, apabila suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika suatu ciptaan diciptakan oleh seorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan orang yang merancang.
- B. Badan hukum, dalam hal ini dapat dalam bentuk badan hukum privat maupun public. Kepemilikan hak cipta dalam bentuk badan hukum diatur dalam Pasal 37 Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi “apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas

ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.”

1.2.2. Ciptaan dan Objek Hak Cipta

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Pasal 1 angka 3 Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah seni hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Secara yuridis normative dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu :¹⁵

- A. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
- B. Karya dalam bidang kesenian.
- C. Karya dalam bidang kesusteraan.

Pada Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan : “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.”
Terdiri atas :

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.

¹³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 235.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 70.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 204.

- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fitigrafi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- q. Permainan video, program computer

1.2.3. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.¹⁶ Menurut Pasal 1 angka 4 Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Ciptaan dapat diciptakan pribadi sendiri atau diciptakan dua orang atau lebih. Dalam hal suatu ciptaan diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak ciptaan masing – masing atas bagian ciptaannya.¹⁷

1.2.4. Hak Eksklusif

Beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak relative, yaitu:¹⁸

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
- b. Mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus menerus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. System yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap orang yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian.
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
- e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya.

1.3. PATEN

Salah satu wujud kegiatan tridharma perguruan tinggi adalah adanya karya hasil penelitian Dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi. HKI diharapkan dapat meningkatkan penelitian Dosen pada perguruan tinggi.

Pengaturan mengenai paten di Indonesia baru pertama kali pada tahun 1989, yakni dengan disahkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398), yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Adapun dasar pertimbangan dan sekaligus tujuan

¹⁶ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2011) hlm 110.

¹⁷ Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Sri Soedewi Majschoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Belanda*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm 25 – 27.

pengesahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 ini, sebagai berikut:¹⁹

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri;
- c. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan perangkat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut;
- d. Bahwa untuk mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera menetapkan pengaturan mengenai paten dalam suatu undang – undang;

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan di Indonesia untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari Bahasa Belanda. Istilah *oktrooi* ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor* atau *auctorizare*. Namun, pada perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu patent. Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah *brevet de inventior*.²⁰

Dengan demikian, paten adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (inventor) atas hasil penemuan (invention) yang dilakukannya di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya, terkecuali atas izinnnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya.²¹

Ciri khas yang dapat dipatenkan adalah kandungan pengetahuan yang sistematis, yang dapat dikomunikasikan, yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah. Kemudian pengetahuan itu harus ada di suatu tempat, dalam bentuk tulisan atau dalam pikiran orang dan harus diungkapkan atau dapat diungkapkan sehingga dapat dikomunikasikan dari orang yang satu ke yang lainnya.²²

1.4.TENTANG BUDAYA MUTU PERGURUAN TINGGI

Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri dari nilai – nilai, tradisi, produser dan harapan tentang promosi mutu. Sedangkan tujuan dari budaya mutu adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan – aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus menerus.²³

Salah satu komitmen perguruan tinggi adalah adanya pembentukan sentra hak

¹⁹ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hlm 192.

²⁰ *Ibid.*, hlm 205.

²¹ *Ibid.*, hlm 206.

²² *Ibid.*, hlm 208.

²³ I Made Madiarsa, MMA., *Membangun Perguruan Tinggi Berbudaya Mutu*, lihat di

https://fisip.unipas.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/20171126030134_i-made-madiarsa-prosiding-revitalisasi-tata-kelola-perguruan-tinggi-2017.pdf

Kekayaan Intelektual, yang bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan dapat bersaing di dalam tingkat nasional maupun internasional. Sentra Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi dapat mendorong adanya budaya mutu, yang merupakan implementasi dari proses Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) huruf d, berbunyi: “Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.”

Hak cipta dalam perguruan tinggi dikembangkan untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta. Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.²⁴ Pembentukan sentra HKI pada Perguruan Tinggi memiliki peran untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan teknologi yang berorientasi Hak Kekayaan Intelektual. Sentra HKI pada perguruan tinggi merupakan kewajiban sesuai bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK, berbunyi : “Dalam meningkatkan pengelolaan kekaayaan intelektual Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.” dan dalam Pasal 23 ayat (1) berbunyi : “Pemerintah menjamin

perlindungan bagi HKI yang dimiliki perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang – undangan.” Selain itu, Perguruan Tinggi banyak menghasilkan karya – karya ilmiah dan teknologi yang harus dilindungi, seperti tujuan dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa setiap karya cipta harus dilindungi, karena selain memiliki nilai moral, dan dalam hal tertentu juga memiliki nilai ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan dan norma – norma positif di dalam system perundang-undangan yang berlaku.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu antara lain mencakup bahan – bahan Pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan penelahaan terhadap bahan – bahan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisa secara normative – kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap hasil karya cipta pada perguruan tinggi pada dasarnya sudah diatur di dalam Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu di dalam Pasal 40 ayat (1), yang menegaskan ciptaann yang dapat dilindungi meliputi ciptaan : a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu dan/atau

²⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap*

Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 2.

musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk terapan; h. Karya arsitektur; i. Peta; j. Karya seni batik atau seni motif lain; k. Karya fotografi; Protet; m. Karya sinematografi; n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. Permainan video; dan s. Program Komputer. Perlindungan terhadap karya cipta di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ilmu Pengetahuan merupakan rangkaian pengetahuan yang dihasilkan dari tahapan yang menggunakan metode ilmiah. Hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh civitas akademika dapat dilindungi oleh HKI, selain terdapat perlindungan terhadap hak moral, akan tetapi juga ada nilai ekonomi didalam hasil penelitian tersebut, salah satunya royalti.

Selain itu apabila HKI dijadikan sebagai salah satu poin dari budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi, maka akan terjadi dorongan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan tinggi didorong untuk menerbitkan kebijakan untuk pengelolaan HKI, yang bertujuan untuk mengelola dan memfasilitasi hasil penelitian yang bertujuan selain meningkatkan kuantitas dan kualitas perguruan tinggi, juga dapat menjadikan pendapatan dari sisi ekonomi.

Peranan HKI dalam Budaya Mutu di Perguruan Tinggi sangat berperan, hal ini dapat dilihat dengan adanya aturan di dalam penilaian akreditasi institusi yang

mewajibkan adanya HKI sebagai Luaran dalam penilaian keberhasilan suatu institusi dan/atau Perguruan Tinggi dalam menjalankan Tridharma.

IV. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Sentra atau pusat studi HKI menjadi kewajiban perguruan tinggi untuk menjamin HKI terhadap karya – karya ilmiah Dosen dan Mahasiswa.
- b. Sentra HKI mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya – karya ilmiah, dan dapat secara tidak langsung akan membuat adanya budaya mutu terkait dengan HKI
- c. Budaya Mutu HKI merupakan salah satu yang wajib dijalankan oleh Perguruan tinggi, sebab salah satu penilaian akreditasi perguruan tinggi adalah adanya hasil karya ilmiah yang sudah diakui dalam HKI.

2. Saran

- a. Perguruan tinggi mendirikan lembaga HKI seperti Sentra HKI atau Pusat Studi HKI
- b. Perguruan tinggi membantu menjembatani Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan hasil karya ilmiah yang memiliki nilai ekonomis
- c. Sosialisasi secara terus menerus dan HKI menjadi kewajiban atau keharusan, agar tercipta budaya mutu yang bernilai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Afrillyanna Purba, *TRIPs – WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional*

- Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005)
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003)
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Hari Sasangka, *Kompilasi Undang – Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008)
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2018)
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003)
- Sri Soedewi Majschoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Belanda*, (Yogyakarta : Liberty, 1981)
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2011)
- Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
https://fisip.unipas.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/20171126030134_i-made-madiarsa-prosiding-revitalisasi-tata-kelola-perguruan-tinggi-2017.pdf